REFLECTION JOURNAL
https://journal-center.litpam.com/index.php/RJ
reflectionjournal21@gmail.com

Desember, 2024 Vol. 4, No. 2
e-ISSN: 2808-1501
pp. 116-123

Analisis Implementasi Program Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis oleh Dinas Sosial Kota Mataram

Miftahul Janah, Suharyani, Herlina, Kholisussa'di
Prodi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Universitas Pendidikan Mandalika.
*Correspondence e-mail: kholisussakdi@undikma.ac.id

Diterima: December 2024; Revisi: December 2024; Publikasi: December 2024

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implementasi program penanggulangan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial Kota Mataram melalui tujuh komponen intervensi, yaitu pendataan dan identifikasi, penjangkauan, penertiban, rehabilitasi dan pembinaan, pelatihan dan pemberdayaan ekonomi, reintegrasi sosial, serta evaluasi dan pemantauan. Studi menggunakan desain deskriptif kuantitatif berbasis persepsi dengan data kuantitatif utama dari 20 petugas Dinas Sosial yang terlibat langsung dalam penanganan, sedangkan wawancara terhadap 10 gelandangan dan pengemis digunakan sebagai data pendukung. Skor dianalisis menggunakan persentase skala Likert dan dibaca menurut interval kategori efektivitas. Hasil menunjukkan rata-rata implementasi sebesar 76,6% dan berada pada kategori efektif. Pendataan dan identifikasi memperoleh skor tertinggi (100%), diikuti reintegrasi sosial (83%) serta evaluasi dan pemantauan (82%). Penjangkauan mencapai 80%, pelatihan dan pemberdayaan ekonomi 73,6%, dan penertiban 62,3%. Rehabilitasi dan pembinaan menjadi komponen terlemah dengan skor 55,6% dan hanya berada pada kategori cukup efektif. Pola ini menunjukkan bahwa kapasitas administratif, penjangkauan, dan pemantauan relatif lebih kuat dibandingkan intervensi rehabilitatif jangka panjang. Temuan memperluas studi sebelumnya tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2012 dengan memberikan pemetaan komparatif terhadap tujuh tahapan layanan dari perspektif pelaksana dan penerima layanan. Implikasi utama penelitian adalah perlunya penguatan rehabilitasi, pembinaan berkelanjutan, dukungan ekonomi pascapelatihan, dan koordinasi lintas sektor agar penanganan tidak berhenti pada penertiban dan pemulangan.

Kata Kunci: Gelandangan Dan Pengemis, Implementasi Kebijakan, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Ekonomi, Reintegrasi Sosial, Kota Mataram.

Analysis of the Implementation of the Homeless and Beggar Management Program by the Mataram City Social Affairs Office

Abstract

This study examines the implementation of programs for addressing homelessness and begging by the Mataram City Social Service across seven intervention components: data collection and identification, outreach, enforcement, rehabilitation and guidance, skills training and economic empowerment, social reintegration, and evaluation and monitoring. The study employed a quantitative descriptive, perception-based design. The primary quantitative data were obtained from 20 Social Service officers directly involved in program implementation, while interviews with 10 homeless persons and beggars were used as supporting evidence. Likert-scale scores were converted into percentages and interpreted using effectiveness intervals. The overall implementation score was 76.6%, indicating an effective level. Data collection and identification received the highest score (100%), followed by social reintegration (83%) and evaluation and monitoring (82%). Outreach scored 80%, skills training and economic empowerment 73.6%, and enforcement 62.3%. Rehabilitation and guidance was the weakest component, scoring 55.6% and falling within the moderately effective category. The pattern suggests that administrative capacity, outreach, and monitoring are relatively stronger than sustained rehabilitative interventions. The study extends previous work on the implementation of Mataram City Regulation No. 5 of 2012 by comparatively mapping seven stages of service delivery from the perspectives of implementers and service recipients. The findings imply that stronger rehabilitation, continuous guidance, post-training economic support, and cross-sector coordination are required to move policy responses beyond temporary enforcement and return-to-family measures.

Keywords: *Homelessness, Begging, Policy Implementation, Social Rehabilitation, Economic Empowerment, Social Reintegration.*

How to *Cite:* Janah, M. ., Suharyani, Herlina, & Sa'di, K. (2024). Analisis Implementasi Program Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis oleh Dinas Sosial Kota Mataram. *Reflection Journal*, *4*(2), 116-123. https://doi.org/10.36312/rj.v4i2.4825

https://doi.org/10.36312/rj.v4i2.4825

Copyright© 2024, Janah et al
This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

PENDAHULUAN

Gelandangan dan pengemis merupakan persoalan kesejahteraan sosial yang tidak dapat dipahami semata-mata sebagai gangguan ketertiban umum. Keberadaannya berkaitan dengan kemiskinan, kerentanan pekerjaan, keterbatasan keterampilan, lemahnya dukungan keluarga, mobilitas penduduk, dan akses yang tidak merata terhadap layanan sosial. Karena itu, kebijakan penanganan membutuhkan kombinasi tindakan preventif, rehabilitatif, pemberdayaan, reintegrasi, dan pemantauan yang berkelanjutan. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2012 menempatkan penanggulangan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia serta menegaskan tujuan pencegahan, pemulihan fungsi sosial, kemandirian ekonomi, dan partisipasi masyarakat (Pemerintah Kota Mataram, 2012). Kerangka tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak cukup dinilai dari berkurangnya keberadaan kelompok sasaran di ruang publik, tetapi juga dari kualitas proses layanan yang memungkinkan mereka kembali berfungsi secara sosial dan ekonomi.

Konteks Kota Mataram penting karena kota ini merupakan pusat aktivitas pemerintahan, pendidikan, perdagangan, dan jasa di Nusa Tenggara Barat. Mobilitas penduduk dan konsentrasi aktivitas ekonomi menghasilkan peluang sekaligus kerentanan sosial. Studi lokal terdahulu menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 telah menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, perilaku kelompok sasaran yang sulit diarahkan, dan kebiasaan masyarakat memberikan uang atau barang secara langsung di ruang publik (Nasir et al., 2022). Temuan yang lebih baru juga menggambarkan bahwa Dinas Sosial Kota Mataram mengembangkan pendekatan humanis, preventif, asesmen sosial, dan pemberdayaan melalui kegiatan penjangkauan rutin, yang menegaskan pergeseran dari penertiban semata menuju intervensi yang lebih kolaboratif (Nurfitrianingsih et al., 2025).

Walaupun kerangka hukum dan berbagai bentuk intervensi telah tersedia, persoalan ilmiah yang belum cukup terjawab adalah bagaimana kualitas implementasi tersebut berbeda pada setiap tahapan layanan. Penelitian yang hanya menilai keberadaan regulasi atau mendeskripsikan aktivitas penertiban tidak dapat menunjukkan apakah kelemahan program terletak pada pendataan, penjangkauan, rehabilitasi, pemberdayaan, reintegrasi, atau pemantauan. Padahal, variasi antartahap penting bagi pengambilan keputusan karena kegagalan pada satu tahap dapat mengurangi efektivitas tahap lainnya. Sebagai contoh, pendataan yang baik tidak otomatis menghasilkan perubahan kesejahteraan apabila kapasitas rehabilitasi, pelatihan, atau dukungan pascareintegrasi masih terbatas.

Literatur mengenai penanganan gelandangan dan pengemis di Indonesia menunjukkan bahwa rehabilitasi sosial merupakan proses multidimensi. Sihombing et al. (2020) menemukan bahwa pelaksanaan rehabilitasi di berbagai balai di Pulau Jawa mencakup proses layanan, ragam program, serta faktor pendukung dan penghambat yang berasal dari penerima layanan, lembaga, maupun lingkungan eksternal. Maryatun dan Taftazani (2022) juga menekankan pentingnya layanan berbasis panti dalam memulihkan keberfungsian sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Di sisi lain, studi implementasi di Palangka Raya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antarlembaga, disposisi pelaksana, dan lingkungan sosial-ekonomi sebagaimana dijelaskan dalam perspektif Van Meter dan Van Horn (Forwanti & Setiawan, 2022).

Kerangka implementasi kebijakan menempatkan program publik sebagai proses yang menghubungkan tujuan formal dengan tindakan organisasi dan pengalaman kelompok sasaran. Van Meter dan Van Horn (1975) menegaskan bahwa kinerja

implementasi dipengaruhi oleh kejelasan standar kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik badan pelaksana, disposisi implementor, dan kondisi lingkungan. Dalam konteks penanganan gelandangan dan pengemis, kerangka ini relevan karena layanan tidak dijalankan oleh satu tindakan tunggal. Pendataan, penjangkauan, penertiban, rehabilitasi, pemberdayaan, reintegrasi, dan pemantauan menuntut sumber daya, koordinasi, konsistensi prosedur, serta penerimaan dari penerima layanan. Dengan demikian, perbedaan skor antarkomponen dapat dibaca sebagai indikasi variasi kapasitas implementasi, bukan semata-mata penilaian administratif.

Celah penelitian terletak pada masih terbatasnya studi di Kota Mataram yang membandingkan secara bersamaan tujuh tahapan implementasi dari sisi pelaksana dan penerima layanan. Nasir et al. (2022) berfokus pada pelaksanaan regulasi dan kendalanya, sedangkan Nurfitrianingsih et al. (2025) mendeskripsikan praktik penanganan dan pendekatan kolaboratif dalam kegiatan lapangan. Penelitian ini menawarkan pemetaan proses yang lebih tersegmentasi dengan menilai tujuh komponen layanan dan menempatkan wawancara penerima layanan sebagai bukti pendukung terhadap skor persepsi pelaksana. Kebaruan penelitian bukan terletak pada penciptaan teori baru, melainkan pada diagnosis komparatif antartahap implementasi yang dapat menunjukkan titik kuat dan titik lemah program secara lebih terarah.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi program penanggulangan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial Kota Mataram pada tujuh komponen: pendataan dan identifikasi, penjangkauan, penertiban, rehabilitasi dan pembinaan, pelatihan dan pemberdayaan ekonomi, reintegrasi sosial, serta evaluasi dan pemantauan. Studi ini diposisikan sebagai evaluasi deskriptif berbasis persepsi, bukan evaluasi dampak kausal. Oleh karena itu, hasilnya dimaksudkan untuk memetakan pengalaman implementasi dan menentukan prioritas perbaikan kebijakan, terutama pada komponen yang menunjukkan skor relatif rendah.

METODE

Metode penelitian Pendidikan dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, seuatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang Pendidikan (Sugiyono, 2017: 6). Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif berbasis persepsi. Desain ini dipilih untuk menggambarkan tingkat implementasi program berdasarkan penilaian petugas yang terlibat langsung dalam penanganan gelandangan dan pengemis. Data wawancara dari penerima layanan digunakan secara terbatas sebagai data pendukung untuk memberi konteks terhadap skor kuantitatif. Dengan posisi tersebut, penelitian tidak mengklaim pengukuran efektivitas program secara objektif atau kausal, melainkan menggambarkan persepsi atas pelaksanaan tujuh komponen layanan pada saat penelitian dilakukan. Hal ini dapat dilakukan mulai tahap observasi, pengumpulan data, kemudian disusun, dijelaskan, dan dianalisis sehingga dapat diambil kesimpulan dengan penyebaran angket dan cara pengelolahannya dengan teknik presentase skala likert. Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah sebanyak 30 orang pegawai Dinas Sosial Kota Mataram yang terlibat langsung dalam implementasi penanggulangan gelandangan dan pengemis, serta gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Mataram sebanyak 100 orang. Jadi besar keseluruhan populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 130 orang. Adapun menurut sugiyono, 2020: 133), bahwa “Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu”. Karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Berdasarkan pertimbangan di atas dengan populasi yang berjumlah 130 orang, maka peneliti hanya

mengambil sampel sejumlah 30 orang. Yaitu dari petugas Dinas Sosial sebanyak 20 orang, gelandangan dan pengemis 10 orang.

Instrumen utama adalah angket skala Likert yang mengukur. Dokumen sumber yang tersedia untuk revisi artikel tidak memuat jumlah item angket, koefisien validitas, atau reliabilitas internal; karena itu, statistik tersebut tidak direkonstruksi dan menjadi keterbatasan yang dinyatakan secara eksplisit.

Data angket dikumpulkan dari petugas yang memenuhi kriteria keterlibatan langsung. Skor jawaban tiap komponen dijumlahkan, dibandingkan dengan skor ideal, kemudian dikonversi menjadi persentase dengan rumus P = (skor aktual/skor ideal) × 100%. Untuk menjaga konsistensi interpretasi, persentase dibaca menggunakan interval lima tingkat yang lazim pada transformasi skala Likert, yaitu 81–100% sangat efektif, 61–80% efektif, 41–60% cukup efektif, 21–40% kurang efektif, dan 0–20% tidak efektif. Data wawancara tidak dianalisis sebagai dataset kualitatif mandiri, melainkan digunakan untuk memberi ilustrasi pengalaman penerima layanan terhadap hasil kuantitatif. Analisis difokuskan pada perbandingan antarkomponen, identifikasi komponen terkuat dan terlemah, serta implikasinya terhadap proses implementasi.

HASIL DAN DISKUSI

Hasil Penelitian

Hasil menunjukkan bahwa implementasi program penanggulangan gelandangan dan pengemis memperoleh rata-rata 76,6% dan berada pada kategori efektif. Namun, skor antarkomponen bervariasi cukup lebar, dari 55,6% pada rehabilitasi dan pembinaan hingga 100% pada pendataan dan identifikasi. Variasi ini menunjukkan bahwa implementasi tidak berlangsung dengan kekuatan yang seragam pada seluruh tahapan layanan.

Tabel 1. Rekapitulasi implementasi program penanggulangan gelandangan dan pengemis

No.	Komponen Implementasi	Persentase	Kategori
1	Pendataan dan identifikasi	100%	Sangat efektif
2	Penjangkauan	80%	Efektif
3	Penertiban	62,3%	Efektif
4	Rehabilitasi dan pembinaan	55,6%	Cukup efektif
5	Pelatihan dan pemberdayaan ekonomi	73,6%	Efektif
6	Reintegrasi sosial	83%	Sangat efektif
7	Evaluasi dan pemantauan	82%	Sangat efektif

1. Kapasitas Awal Program: Pendataan, Penjangkauan, dan Penertiban

Pendataan dan identifikasi memperoleh skor 100% dan menjadi komponen tertinggi. Indikator pada tahap ini mencakup ketersediaan data, metode pendataan, dan kesesuaian informasi dengan kondisi lapangan. Wawancara pendukung menunjukkan bahwa penerima layanan pernah didata dan memperoleh penjelasan mengenai proses pencatatan identitas. Skor yang sangat tinggi menunjukkan konsistensi persepsi petugas terhadap fungsi administrasi awal, tetapi harus dibaca secara hati-hati karena data penelitian tidak menyediakan distribusi respons per item maupun pengujian bias respons. Karena itu, skor 100% lebih tepat ditafsirkan sebagai persepsi yang sangat positif terhadap pelaksanaan pendataan, bukan bukti bahwa sistem data telah sempurna secara objektif.

Penjangkauan memperoleh 80% dan berada pada kategori efektif. Responden penerima layanan menyatakan pernah didatangi petugas di lokasi mereka mengemis

atau beristirahat dan menggambarkan interaksi petugas sebagai relatif baik. Sementara itu, penertiban memperoleh 62,3%, jauh lebih rendah daripada pendataan dan penjangkauan. Kutipan wawancara menunjukkan bahwa sebagian penerima layanan mengetahui alasan penertiban dan merasa diperlakukan dengan sopan. Perbedaan skor menunjukkan bahwa tahap regulatif dan koordinatif lebih menantang dibandingkan pendataan dan kontak awal.

2. Intervensi Perubahan: Rehabilitasi, Pembinaan, dan Pemberdayaan Ekonomi

Rehabilitasi dan pembinaan memperoleh 55,6% dan menjadi satu-satunya komponen dalam kategori cukup efektif. Penerima layanan melaporkan adanya arahan dan motivasi selama pembinaan, tetapi skor agregat menunjukkan bahwa ketersediaan program dan partisipasi belum dipersepsikan sekuat komponen lain. Temuan ini penting karena rehabilitasi merupakan jembatan antara penertiban dan perubahan kondisi sosial yang lebih berkelanjutan. Dengan kata lain, kelemahan pada tahap ini berpotensi membuat hasil penjangkauan dan penertiban menjadi temporer.

Pelatihan dan pemberdayaan ekonomi memperoleh 73,6% dan masuk kategori efektif. Indikatornya meliputi ketersediaan pelatihan keterampilan, bantuan modal atau akses kerja, dan hasil pemberdayaan. Wawancara pendukung menggambarkan pengalaman mengikuti pelatihan keterampilan dan menerima dukungan untuk usaha. Namun, desain penelitian tidak melacak pendapatan, keberlanjutan usaha, atau kejadian kembali ke jalan setelah pelatihan, sehingga hasil ini menggambarkan persepsi terhadap ketersediaan dan manfaat program, bukan dampak ekonomi jangka panjang.

3. Reintegrasi Sosial serta Evaluasi dan Pemantauan

Reintegrasi sosial memperoleh skor 83% dan berada pada kategori sangat efektif. Nilai 83% digunakan secara konsisten dalam artikel ini karena sesuai dengan tabel rekapitulasi dan pembahasan naskah sumber; angka 80% yang muncul pada satu bagian uraian sebelumnya diperlakukan sebagai inkonsistensi penulisan. Wawancara menunjukkan pengalaman pemulangan ke keluarga dan adanya dukungan setelah kembali ke lingkungan sosial. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemulangan dan penerimaan kembali di keluarga merupakan salah satu kekuatan program menurut responden.

Evaluasi dan pemantauan memperoleh 82% dan juga berada pada kategori sangat efektif. Penerima layanan menyebut adanya kunjungan kembali atau pertanyaan dari petugas setelah mengikuti program. Skor ini menunjukkan adanya mekanisme tindak lanjut yang dipersepsikan positif. Meskipun demikian, penelitian tidak menyertakan indikator hasil jangka panjang, seperti kestabilan pekerjaan, keberlanjutan tempat tinggal, atau frekuensi kembali mengemis, sehingga pemantauan yang tinggi belum dapat disamakan dengan keberhasilan sosial-ekonomi jangka panjang.

Temuan utama penelitian adalah adanya ketimpangan kapasitas antara tahapan administratif dan tindak lanjut di satu sisi dengan intervensi rehabilitatif di sisi lain. Rata-rata 76,6% menunjukkan implementasi yang secara umum dinilai efektif, tetapi nilai rata-rata dapat menutupi kelemahan penting pada komponen tertentu. Pendataan dan identifikasi, reintegrasi sosial, serta evaluasi dan pemantauan menunjukkan skor tertinggi, sedangkan rehabilitasi dan pembinaan merupakan komponen terendah. Pola ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial relatif kuat dalam mengenali kelompok sasaran, melakukan kontak, mengembalikan individu ke lingkungan sosial, dan melakukan tindak lanjut, tetapi kapasitas perubahan perilaku dan penguatan fungsi sosial selama proses rehabilitasi masih perlu diperkuat.

Perbedaan tersebut dapat dijelaskan melalui perspektif implementasi kebijakan. Van Meter dan Van Horn (1975) menempatkan sumber daya, komunikasi, karakteristik organisasi, disposisi pelaksana, dan lingkungan sebagai faktor penting dalam kinerja implementasi. Pendataan dan pemantauan cenderung memiliki prosedur yang lebih terstandar, output administratif yang jelas, dan dapat dijalankan dalam rentang waktu relatif singkat. Sebaliknya, rehabilitasi menuntut sumber daya manusia khusus, fasilitas, durasi layanan, keterlibatan keluarga, motivasi penerima layanan, serta hubungan dengan layanan kesehatan, ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial. Karena itu, skor rehabilitasi yang lebih rendah tidak hanya mencerminkan kinerja petugas, tetapi juga kompleksitas kelembagaan dan sosial pada tahapan tersebut.

Interpretasi ini sejalan dengan studi rehabilitasi sosial di Indonesia. Sihombing et al. (2020) menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi dipengaruhi oleh faktor internal lembaga, karakteristik warga binaan, dan faktor eksternal. Maryatun dan Taftazani (2022) menegaskan bahwa pemulihan keberfungsian sosial memerlukan proses pelayanan yang lebih luas daripada sekadar penertiban. Hasil penelitian di Mataram juga konsisten dengan Nasir et al. (2022), yang menemukan adanya hambatan berupa keterbatasan anggaran, kesulitan mengarahkan sebagian kelompok sasaran, dan perilaku masyarakat yang tetap memberikan bantuan langsung di jalan. Faktor-faktor tersebut dapat memperlemah kontinuitas pembinaan dan meningkatkan kemungkinan seseorang kembali ke pola hidup sebelumnya setelah intervensi selesai.

Skor pelatihan dan pemberdayaan ekonomi sebesar 73,6% mengindikasikan adanya basis program yang dapat dikembangkan, tetapi efektivitas jangka panjangnya memerlukan ukuran yang lebih substantif. Program keterampilan hanya akan berkontribusi pada kemandirian jika sesuai dengan kapasitas peserta, tersambung dengan peluang kerja atau pasar, memperoleh pendampingan usaha, dan dipantau setelah bantuan diberikan. Studi kebijakan di Aceh Utara juga menunjukkan bahwa penanganan dapat mencakup pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi produktif (Yusrizal & Asmara, 2020). Dengan demikian, rekomendasi kebijakan bagi Mataram bukan sekadar menambah pelatihan, melainkan memperkuat rantai layanan dari asesmen kebutuhan, pemilihan keterampilan, akses modal atau pekerjaan, hingga pendampingan pascaprogram.

Skor reintegrasi sosial yang tinggi merupakan temuan positif, tetapi perlu dibedakan antara keberhasilan pemulangan dan keberhasilan reintegrasi yang berkelanjutan. Reintegrasi idealnya mencakup penerimaan keluarga, akses terhadap kebutuhan dasar, penguatan relasi sosial, dan kemampuan mempertahankan mata pencaharian yang tidak bergantung pada aktivitas mengemis. Karena penelitian ini belum mengukur keberulangan kembali ke jalan, temuan 83% lebih tepat dibaca sebagai persepsi positif atas proses reintegrasi daripada bukti outcome jangka panjang. Hal yang sama berlaku pada evaluasi dan pemantauan; frekuensi tindak lanjut merupakan prasyarat penting, tetapi kualitas hasil pemantauan harus dikaitkan dengan perubahan kondisi penerima layanan.

Secara kebijakan, temuan mendukung pendekatan yang lebih humanis dan lintas sektor. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2012 telah menegaskan aspek pencegahan, rehabilitasi, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat (Pemerintah Kota Mataram, 2012). Praktik yang dilaporkan Nurfitrianingsih et al. (2025) juga menunjukkan adanya penjangkauan, edukasi, asesmen sosial, dan pemberdayaan dalam pelaksanaan lapangan. Oleh karena itu, penguatan berikutnya sebaiknya diarahkan pada integrasi layanan Dinas Sosial dengan sektor ketenagakerjaan, kesehatan, kelurahan, lembaga kesejahteraan sosial, dan komunitas. Kolaborasi tersebut penting agar pemulangan tidak menjadi akhir program, tetapi transisi menuju dukungan sosial dan ekonomi yang lebih stabil.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang harus dipertimbangkan saat menafsirkan hasil. Pertama, sampel kecil dan purposive sehingga tidak merepresentasikan seluruh kelompok sasaran secara statistik. Kedua, skor utama berasal dari persepsi petugas, sehingga potensi bias sosial dan bias penilaian institusional tidak dapat diabaikan. Ketiga, dokumen penelitian yang tersedia tidak memuat jumlah item, distribusi respons, uji validitas, maupun koefisien reliabilitas; kekurangan ini membatasi penilaian terhadap kualitas psikometrik instrumen. Keempat, wawancara penerima layanan hanya berfungsi sebagai data pendukung dan belum dianalisis dengan prosedur kualitatif yang mendalam. Kelima, studi tidak mengukur outcome jangka panjang seperti stabilitas pendapatan, tempat tinggal, atau kejadian kembali mengemis. Penelitian selanjutnya perlu menggunakan sampel penerima layanan yang lebih besar, instrumen tervalidasi, analisis terpisah antara pelaksana dan penerima layanan, serta desain longitudinal untuk mengukur keberlanjutan hasil program.

KESIMPULAN

Implementasi program penanggulangan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial Kota Mataram secara umum berada pada kategori efektif dengan rata-rata 76,6%, tetapi kekuatan program tidak merata pada seluruh tahapan. Pendataan dan identifikasi menjadi komponen terkuat dengan skor 100%, diikuti reintegrasi sosial sebesar 83% dan evaluasi serta pemantauan sebesar 82%. Penjangkauan, pemberdayaan ekonomi, dan penertiban berada pada kategori efektif, sedangkan rehabilitasi dan pembinaan menjadi titik terlemah dengan skor 55,6% dan hanya cukup efektif. Temuan ini menunjukkan bahwa kapasitas administratif dan tindak lanjut relatif lebih baik daripada intervensi rehabilitatif yang membutuhkan proses lebih panjang dan sumber daya lebih kompleks. Kontribusi penelitian terletak pada pemetaan komparatif tujuh tahapan implementasi di Kota Mataram, sehingga prioritas perbaikan dapat diarahkan secara lebih spesifik. Dinas Sosial perlu memperkuat rehabilitasi berbasis kebutuhan individu, memperpanjang pendampingan pascapelatihan, menghubungkan peserta dengan kesempatan kerja atau usaha yang realistis, dan membangun pemantauan pascareintegrasi berbasis outcome. Kolaborasi dengan sektor ketenagakerjaan, kesehatan, kelurahan, keluarga, dan lembaga kesejahteraan sosial juga diperlukan agar penanganan tidak berhenti pada penertiban atau pemulangan. Penelitian lanjutan perlu menggunakan instrumen yang tervalidasi, sampel penerima layanan yang lebih besar, serta pengukuran longitudinal untuk menilai keberlanjutan perubahan sosial-ekonomi.

SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka peneliti ingin memberikan saran yang sekiranya sangat penting untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan: 1. Bagi Dinas Sosial Kota Mataram disarankan dapat memperkuat pendekatan yang lebih dalam penanganan gepeng, dengan lebih mengutamakan pembinaan, pelatihan keterampilan, serta menyalurkan kerja sesuai dengan kondisi kemampuan individu. 2. Bagi masyarakat umum dihimbau untuk tidak memberikan uang secara langsung kepada gepeng di jalanan, melainkan berkontribusi melalui saluran resmi seperti program sosial pemerintah atau lembaga yang terpercaya. 3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan dari segi ruang lingkup dan waktu. Oleh karena itu, disarankan peneliti selanjutnya dapat mengeksplorasi faktor-faktor penyebab kemunculan gepeng secara lebih mendalam serta menilai efektifitas jangka panjang dari program penanggulangan yang telah dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Forwanti, E., & Setiawan, F. (2022). Implementasi kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya (Perda Kota Palangka Raya No. 9 Tahun 2012). *Jurnal Administrasi Publik (JAP).*

Maryatun, M., & Taftazani, B. M. (2022). Kebijakan penanganan gelandangan pengemis berbasis panti untuk keberfungsian sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS): Studi pada Panti Pelayanan Sosial Pengemis Gelandangan Orang Terlantar Mardi Utomo Semarang. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 13(2), 103–117. https://doi.org/10.23969/kebijakan.v13i2.5208

Nasir, H. M., Sofwan, S., & Kafrawi, K. (2022). Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis (Studi di Kota Mataram). *Jurnal Diskresi*, 1(2). https://doi.org/10.29303/diskresi.v1i2.2092

Nurfitrianingsih, N., Nugraha, M. G., Gunawan, E., Rahmi, S. A., Hidayat, R., & Jailani, M. A. (2025). Upaya penanggulangan Dinas Sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis di wilayah Kota Mataram. *Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat*, 8(3), 309–315. https://doi.org/10.29303/jppm.v8i3.9205

Pemerintah Kota Mataram. (2012). Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis.

Sihombing, E. A. P., Yuliani, D., & Windriyanti, W. (2020). Pelaksanaan program rehabilitasi sosial bagi gelandangan dan pengemis di balai rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis di Pulau Jawa. *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial*, 2(2). https://doi.org/10.31595/rehsos.v2i2.310

Sugiyono. (2017). *Metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Supraptiningsih, U. (2016). Karakteristik pengemis perempuan di Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan. *Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*, 13(2), 357. https://doi.org/10.19105/nuansa.v13i2.1104

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). *The policy implementation process: A conceptual framework*. Administration & Society, 6(4), 445–488.

Yusrizal, Y., & Asmara, R. (2020). Kebijakan penanggulangan gelandangan dan pengemis (Studi penelitian di Kabupaten Aceh Utara). *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 16–28. https://doi.org/10.29103/reusam.v8i1.2606